

Kuliah Gratis Bakal Dimulai Semester Depan



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 07/04/2025

BONTANG - Pemkot bakal segera melaksanakan program pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) di seluruh kampus di Bontang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, anggaran untuk pembiayaan ini diambil dari langkah efisiensi yang dilakukan pada APBD 2025.

“Jadi, nantinya untuk biaya kuliah mulai tahun ini sudah gratis. Warga tidak perlu mengeluarkan uang,” kata Neni. Pihaknya pun telah bertemu dengan pimpinan kampus. Nantinya empat kampus yang mendapatkan program biaya kuliah gratis yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma'arif Bontang, Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), dan Universitas Terbuka.

“Khusus Stitek nantinya akan mendapatkan program Gratis Pol dari Pemprov Kaltim. Supaya tidak tumpang tindih,” ucapnya.

Syaratnya untuk mendapatkan program ini yakni memiliki identitas warga Kota Bontang. Pemkot menargetkan dua ribu penerima sasaran terlebih dahulu di tahap awal. Sementara Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memastikan program ini akan berjalan tahun ini. “Masuk di APBD Perubahan mendatang,” tutur dia.

Pemkot sudah melakukan estimasi yakni biaya kuliah selama satu tahun itu totalnya mencapai Rp20 miliar. Namun karena tahun ini hanya satu kali pembebasan biaya, maka hanya setengah yang dikucurkan dari nominal tersebut.

Menurutnya, ini merupakan janji politik pasangan Neni-AH saat mengikuti pertarungan Pilkada. Diharapkan dengan pembebasan biaya kuliah tunggal mampu mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kota Bontang. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kuliah Gratis Bakal Dimulai Semester Depan, 07/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Pasal 11 UU 20/2003, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.